

# **“Apakah Platform Sustainability of Coffee merupakan Solusi Pembangunan Ekonomi yang Tepat Pasca-Konflik? Sebuah Peluang dan Tantangan.”**

**Rahmat Pramulya**

## **Pendahuluan**

Pertumbuhan ekonomi Aceh masih bertumpu pada sektor yang terkait pada rekonstruksi, perdagangan, dan transportasi. Seiring dengan akan berakhirnya upaya rekonstruksi, pertumbuhan sektor-sektor tersebut telah melambat, sementara pelambatan tersebut belum diisi oleh sektor-sektor lain dalam perekonomian (misalnya, pertanian dan industri) (Bank Dunia, 2009). Sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif dan terus tumbuh adalah sektor pertanian. Hal ini memperlihatkan penghidupan masyarakat masih bergantung kepada pertanian. Tetapi masih terdapat keterbatasan di dalam sistem budidaya dan manajemen agribisnis serta industri pasca panen dan pengolahan yang berdampak terhadap daya saing pertanian Aceh.

Selama tiga dekade Aceh pernah mengalami konflik bersenjata berkepanjangan dan menyebabkan penghidupan masyarakat terbatas. Sejak Perjanjian Helsinki 2005, masyarakat Aceh berharap besar terhadap proses pemulihan ekonomi dapat menyentuh penghidupan mereka. Pembangunan ekonomi yang berhasil pada masyarakat korban konflik diyakini membantu proses perdamaian pasca konflik jangka panjang (Mac Ginty, 2009). Selain itu pemulihan kehidupan mantan kombatan ke dalam masyarakat sipil adalah salah satu kunci keberhasilan proses perdamaian (Watson, 2009). Studi Justino (2007) menyatakan bahwa rumah tangga korban konflik yang menjadi miskin kembali selama proses perdamaian berpotensi memunculkan konflik baru.

Salah satu komoditi pertanian Aceh berpotensi penyumbang pertumbuhan ekonomi dan penggerak pembangunan pedesaan adalah Kopi. Komoditi ini memiliki nilai strategis sosial ekonomi karena telah lama dibudi dayakan oleh masyarakat Aceh dan memiliki indikasi geografis (Kopi Gayo). Bagaimana komoditi bernilai ekonomi tinggi tersebut dapat dijadikan sumber penghidupan utama bagi mantan kombatan diperlukan kebijakan dan upaya pengembangan strategis. Hal ini memerlukan analisis efisiensi ekonomi yang berbasis pada alokasi faktor produksi dan pengembangan komoditi pertanian berbasis rantai nilai (dikembangkan oleh Collins (2006)) yang dimodifikasi USAID (2007) menjadi sebuah panduan Pengembangan Rantai Nilai Pada Wilayah Pasca Konflik.

Konflik berkepanjangan berakibat pada rusaknya ekonomi masyarakat, infrastruktur dan pasar yang hancur, buruknya sektor publik, terlantarnya lahan pertanian dan hubungan sosial masyarakat yang mundur (Watson, 2009). Pasca konflik pengembangan komoditi pertanian strategis memerlukan pendekatan *rantai nilai* yang berbasis kepada sensitifitas konflik. Gündüz (2008) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan sensitifitas konflik diperlukan untuk memahami kaitan antara pembangunan dan konflik; dan untuk beradaptasi terhadap kemungkinan munculnya konflik yang potensial dan mengurangi kekerasan.

## Landasan Teori

### Mantan kombatan dalam isu Konflik dan Pembangunan

Isu terhadap mantan kombatan terkait kepada tantangan terbesar memperbaiki *human security* dan mempertahankan keberlanjutan perdamaian melalui upaya mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan normal bersama masyarakat sipil lain. Dengan kata lain, mengeluarkan mereka dari kehidupan bergerilya dan dalam posisi berkonflik menjadi warganegara yang memiliki pekerjaan dan pendapatan. Jika mantan kombatan berperan dalam pembangunan secara konstruktif maka kehadiran dan partisipasi mereka memberikan pandangan positif bagi masyarakat lainnya secara umum. Bukan hanya bermanfaat bagi proses perdamaian melainkan dalam jangka panjang berkontribusi positif pada reintegrasi ekonomi dan sosial. Tetapi kenyataan menunjukkan mantan kombatan memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas serta tidak adanya pengalaman pekerjaan. Kondisi ini diperparah dengan aset produktif dan infrastruktur ekonomi yang rusak akibat konflik berkepanjangan (Watson, 2009).

Penelitian yang berasal dari Survei Penghidupan dan Reintegrasi Aceh atau Aceh Reintegration and Livelihood Surveys (ARLS) yang dilakukan pada tahun 2008 menyebutkan bahwa mantan kombatan dengan aset lebih sedikit dan tingkat pendidikan yang lebih rendah tampaknya bagi mereka hanya tersedia pilihan lebih sedikit di dalam bekerja dan hal ini berhubungan dengan pendapatan mereka yang lebih rendah (Tajima, 2010).

### Pengembangan Rantai Nilai Komoditi Pertanian pada Wilayah Pasca Konflik

"Setiap proyek pembangunan yang ditetapkan di wilayah rawan konflik pasti akan berdampak pada perdamaian dan lingkungan konflik yang positif atau negatif, langsung atau tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja" adalah pernyataan Kenneth Bush (2001) yang dikutip di dalam Gündüz (2008).

Analisis konflik atau analisis yang komponen utamanya sensitif terhadap isu konflik adalah studi terhadap profil, penyebab, pelaku dan dinamika konflik serta hubungan diantaranya. Termasuk kedalamnya adalah memunculkan pandangan perbedaan individu dan kelompok serta menyertakan pandangan tersebut di dalam kerangka analisis yang lebih besar. Sehingga melengkapi dan memperkaya analisis rantai nilai Karena sebenarnya analisis konflik membutuhkan dan menganalisis para pelaku yang tidak selalu berhubungan dengan rantai nilai tetapi relevan dengan isu konflik. Sehingga merencanakan standar Rantai Nilai Sensitifitas Konflik bukanlah pekerjaan yang mudah (Gündüz (2008)).

*Conflict Analysis Tools* bermanfaat sebagai langkah awal memahami konteks konflik yang lebih luas termasuk (1) profilnya (sejarah konflik, demografi yang relevan, faktor geostratik dan geografis dan sebagainya), (2) dinamika (melacak perubahan dalam lintasan konflik dari waktu ke waktu dan melihat tingkat konflik dan jenisnya); (3) aktor (termasuk pihak dalam konflik, pihak perdamaian, pihak ketiga seperti mediator, politisi, pemimpin masyarakat, bisnis, LSM, lembaga keagamaan seperti mesjid) dan (4) penyebab dan pencetus konflik (dari aspek politik, sosial, ekonomi dan masalah lain) (Gündüz (2008)).

Praktisi rantai nilai harus menyusun analisis pada tingkat makro saat awal konflik muncul kemudian mempersempit analisis dengan melihat variabel yang

terkait pada konflik yang berhubungan langsung dengan rantai nilai. Analisis konflik dapat dilakukan pada berbagai tingkatan (domestik, nasional, regional atau global) dan berusaha membangun keterkaitan diantara tingkatan tersebut. Berbagai alat analisis konflik sekarang ada dan tergantung pada tujuan analisis dan aspek-aspek tertentu dapat ditekankan secara berbeda (Gündüz (2008)).

Komponen rantai nilai komoditi pertanian yang menjadi ruang bagi analisis konflik adalah bagian yang dikenal dengan (1) pasar akhir, (2) iklim kondusif berbisnis dan (3) para pelaku rantai nilai dan hubungan diantara mereka. Menurut Kumar *et al* (2010) dan Teresa dan Blackhurst (2009) bahwasanya terdapat risiko. Risiko ini sendiri dipahami ke dalam bentuk konflik yang terjadi di dalam rantai nilai komoditi pertanian atau supply chain. Kedua risiko konflik ini terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Risiko internal terjadi akibat aktifitas di dalam *sphere* (wilayah) dari masing-masing rantai nilai yang diamati, sedangkan risiko eksternal terjadi akibat konfigurasi (bentuk) jaringan rantai nilai komoditi pertanian itu sendiri. Konfigurasi disini diartikan sebagai konflik (risiko) akibat tingkat kepentingan yang saling bertolak belakang dari setiap tingkatan di dalam sphere rantai nilai komoditi pertanian yang ada (gambar). Oleh karena konflik (risiko) internal itu dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam konflik (risiko) tidak sistematis begitu sebaliknya sistematis untuk risiko eksternal.

### **Pendekatan Penelitian**

Peneliti mewawancarai tokoh masyarakat lokal, petani senior, pedagang, pengurus koperasi kopi, mantan kombatan, kelompok asosiasi kopi dan LSM (forum komoditi). Penelitian menggunakan pendekatan dinamika konflik pada rantai nilai. Berdasarkan pemahaman terhadap penyebab konflik yang spesifik dan dampaknya, dinamika konflik pada rantai nilai bertujuan mengidentifikasi keterkaitan antar bagian antara dinamika rantai nilai dan dinamika konflik. Pertanyaan yang relevan adalah

1. Bagaimana sektor ini berhubungan dengan konflik?
2. Apakah sektor ini mencerminkan perdamaian? Dimana posisi kelompok yang berkonflik? Apakah posisi kelompok yang berkonflik terkait atau berhubungan dengan rantai nilai komoditi? Bagaimana mereka dapat berada di rantai nilai? Apakah mereka tertarik masuk pada rantai nilai yang ada?
3. Apakah terdapat perilaku *grievances* (ketidakpuasan) terkait pada sektor ini (misalnya perbedaan status sosial ekonomi, diskriminasi kepada mereka)? Apakah perilaku ketidakpuasan berdampak kepada keinginan pelaku untuk berbisnis bersama dan jika bersedia berbisnis bersama, bagaimana?
4. Apakah sektor ini juga memunculkan perilaku *greed* (keserakahan) (misalnya aktifitas ekonomi illegal dan korupsi)?
5. Apakah sektor ini mengandung kapasitas yang penting (misalnya kelompok bisnis, jaringan profesional, media) yang dapat digerakkan untuk proses perdamaian?

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Sistem Produksi Petani Kopi Organik di Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah, merupakan salah satu dari 23 kabupaten-kota di Provinsi Aceh. Kabupaten beribu kota Takengon ini, memiliki luas wilayah 4 318,39 km atau 431 830 hektar terdiri dari 14 Kecamatan dan 268 Desa. Terdapat di dataran tinggi Gayo, membentang di puncak Bukit Barisan dengan ketinggian 200 – 2.600 meter diatas permukaan laut. Daerah ini terletak pada 410' - 458' Lintang Utara dan 9618' - 9622' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah barat dengan Kabupetan Pidie dan Kabupaten Aceh Barat, sebelah utara dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah dan sebelah selatan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues.

#### Keadaan Topografi

Kabupaten Aceh Tengah, memiliki tofografi wilayah yang bervariasi. Kondisi permukaan tanah menurut tingkat kemiringan seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1. Luas Tanah Menurut Tingkat Kemiringan**

No	Kemiringan (%)	Bentuk Morfologi	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	0-8	Dataran	24 175	5.54
2	9-12	Berombak	58 865	13.49
3	26-40	Bergelombang	121 527	27.85
4	40<	Berbukit-bergunung	227 272	53.12

Sumber : Aceh Tengah Dalam Angka, 2008

#### Keadaan Iklim

Sesuai dengan letak geografis, Kabupaten Aceh Tengah termasuk daerah yang beriklim tropis. Curah hujan rata-rata setiap tahun 1.624 mm dengan rata-38 rata hujan setiap tahun 118 hari. Musim penghujan berlangsung dari bula September sampai Desember, sedangkan musim kemarau dari bulan Januari sampai Agustus. Temperatur maksimum 26 °C dan minimum 15 °C. Kelembaban maksimum 96 persen dan minimum 65 persen. Adapun data-data curah hujan, hari hujan, bulan kering bulan basah disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Data Curah Hujan Tahunan Kabupaten Aceh Tengah**

No	Tahun	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (HH)	Bulan Basah (BB)	Bulan Kering (<75 mm/bln)
1	1996	1961	149	8	3
2	1997	1232	156	5	4
3	1998	1297	149	6	3
4	1999	1570	176	10	1
5	2000	1976	179	9	0
6	2001	2172	143	9	3
7	2002	1234	140	5	5
8	2003	1898	153	9	2

9	2004	1090	103	3	7
10	2005	1811	139	7	5
Jumlah		13340	1245	61	21
Rata-rata		1667.50	155.6	7.6	2.6

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Tengah (2008)

Jenis tanah sangat bervariasi, umumnya didominasi oleh jenis Podzolik Cokelat (49.36 persen) dan Podzolik Merah Kuning (23.30 persen) dengan tekstur liat berpasir. Keadaan geologi terbentuk dari batuan pra-tercier yang terdiri dari jenis batuan beku dan batuan metamorfik, batuan sedimen terciar dan kuarter. Sesuai dengan kondisi fisik daerah, Kabupaten Aceh Tengah adalah merupakan daerah pertanian dan sangat cocok/memenuhi syarat tumbuh yang baik untuk berbagai jenis tanaman pertanian, seperti tanaman pangan dan palawija, hortikultura dan tanaman perkebunan.

### **Penduduk dan Angkatan Kerja**

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan registrasi tahun 2008 tercatat 183.478 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki 90.870 jiwa dan perempuan 92.608 jiwa. Distribusi penduduk perkecamatan sangat variatif. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di atas rata-rata kecamatan 12.811 secara berurutan yaitu kecamatan Kebayakan, Laut Tawar, Pegasing, Silih Nara dan Bebesen. Sedangkan kecamatan lainnya memiliki jumlah penduduk di bawah rata-rata kecamatan. Penyebaran penduduk Kabupaten Aceh Tengah per kecamatan sampai dengan akhir tahun 2008 disajikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Data Penyebaran Penduduk per Kecamatan di Kab. Aceh Tengah**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Linge	4 476	4 582	9 058
2	Bintang	4 556	4 652	9 208
3	Lut Tawar	9 203	9 971	19 174
4	Kebayakan	6 947	6 851	13 798
5	Pegasing	8 976	9 295	18 271
6	Bebesen	17 319	18 637	35 956
7	Kute Panang	3 674	3 529	7 203
8	Silih Nara	10 432	10 217	20 649
9	Ketol	5 938	5 902	11 840
10	Celala	4 341	4 346	8 687
11	Jagong Jeget	4 835	4 335	7 186
12	Atu Lintang	3 645	3 541	9 170
13	Bies	3 321	3 601	6 922
14	Rusip Antara	3 207	3 149	6 356
Jumlah		90 870	92 608	183 478

Sumber : Aceh Tengah Dalam Angka, 2008

Dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah, penduduk angkatan kerja pada usia kerja produktif antara umur 15-64 tahun adalah 60.04 persen. Dari jumlah tersebut penduduk yang bekerja sebanyak 60.32 persen, setengah

menganggur 17.81 persen, dan menganggur 5.91 persen. Lapangan kerja penduduk bekerja meliputi lapangan usaha sektor pertanian, industri, pertambangan, listrik-gas dan air, bangunan, perdagangan-restoran-hotel, angkutan dan telekomunikasi dan jasa-jasa lainnya.

### Potensi Pembangunan Perkebunan

Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi utama kopi Arabika dan sekitar 85 persen masyarakat menggantungkan hidup dari perkebunan kopi dan sebagian juga dari sayur serta buah-buahan. Tanaman perkebunan di Kabupaten Aceh Tengah tercakup dalam areal 51.854,7 hektar dengan 16 jenis tanaman. Total produksi tanaman perkebunan mencapai 21.619,93 ton. Rata-rata produksi per jenis tanaman 1.351,25 ton. Jenis tanaman yang paling penting diantaranya yaitu tanaman kopi. Berdasarkan Tabel 6 tanaman ini memiliki luas dan produksi relatif lebih besar dari jenis tanaman perkebunan lainnya.

**Tabel 4. Luas Panen dan Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan**

Komoditi	Tahun	Luas Areal (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton/tahun)	Produktivitas (kg/ha)
Kopi Arabika	2007	46 493	31 750	22 575	717
	2008	46 493	38 153	27 444	718
	2009	48 001	42 771	28 344	723
Kopi Robusta	2007	3 303	2 089	1 137	544
	2008	3 303	2 089	1 137	544
	2009	3 303	3 015	1 137	544
Tebu	2007	5 424	1 808	14 464	8 000
	2008	5 532	1 833	15 039	8 000
	2009	6 064	4 034	32 118	8 000
Kemiri	2007	645	343	135	393.6
	2008	641	590	211	377
	2009	641	641	211	377
Cassia Vera	2007	610	309	348	1 126.2
	2008	617	401	468	1 000
	2009	617	401	468	1 000
Tembakau	2007	316	122	73	598.4
	2008	22	7	4	500
	2009	22	7	4	500

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah, 2009

\* Kulit manis

Luas tanaman kopi di daerah ini mencapai 46.493 hektar yang terdiri dari tanaman menghasilkan 38.153 hektar, tua/rusak 4.181 hektar, dan belum menghasilkan 4.159 hektar. Rumah tangga petani yang terlibat dalam usaha perkebunan kopi mencapai 32.583 kepala keluarga. Per kepala keluarga mengusahakan tanaman kopi rata-rata 1,46 ha. Pada Tabel 6 dapat dilihat perkembangan luas tanaman perkebunan kopi menghasilkan, belum menghasilkan, tua, rusak di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2008.

**Tabel 5. Luas Tanaman Perkebunan Kopi Menghasilkan, Belum Menghasilkan, Tua, Rusak di Kabupaten Aceh Tengah (Ha)**

Lahan	Tahun	
	2007	2008
Tanaman belum menghasilkan	6 429	4 159
Tanaman menghasilkan	31 750	38 153
Tanaman tua dan rusak	8 314	4 181
Luas areal lahan	46 493	46 493

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah, 2009

Usaha perkebunan kopi di Kabupaten Aceh Tengah didominasi oleh usahatani perkebunan rakyat, perkembangan dan perluasan areal kopi dilaksanakan atas bantuan pemerintah maupun swadaya masyarakat.

Menurut data Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Aceh Tengah seperti yang terlihat pada Tabel 7, luas areal perkebunan kopi arabika yang terdapat di kabupaten itu pada tahun 2008 seluas 46.493 hektar dengan produksi biji kopi 2. 444 ton. Produktivitas kopi itu meningkat dari tahun 2007 dimana dengan luas lahan yang sama hanya mampu memproduksi 22.575 ton biji kopi.

Kopi Arabika sebagai komoditi unggulan daerah mendominasi usahatani perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Tengah. Perekonomian daerah dingin ini juga tergantung dari kopi. Apabila saat produksi kopi melimpah maka harga tinggi dan masyarakat sejahtera namun jika produksi turun atau harga rendah maka ekonomi akan lesu.

**Tabel 6. Produktivitas Kopi Arabika**

Uraian	Tahun	
	2007	2008
Luas Areal (hektar)	22 575.41	27 444.00
Produksi (ton/tahun)	716.80	718.00
Jumlah Petani (KK)	32 583	32 583
Potensi Pengembangan (hektar)	39 082	39 082

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah, 2009

## **2. Saluran dan struktur serta proses dinamika rantai nilai pada komoditi kopi di wilayah pasca konflik**

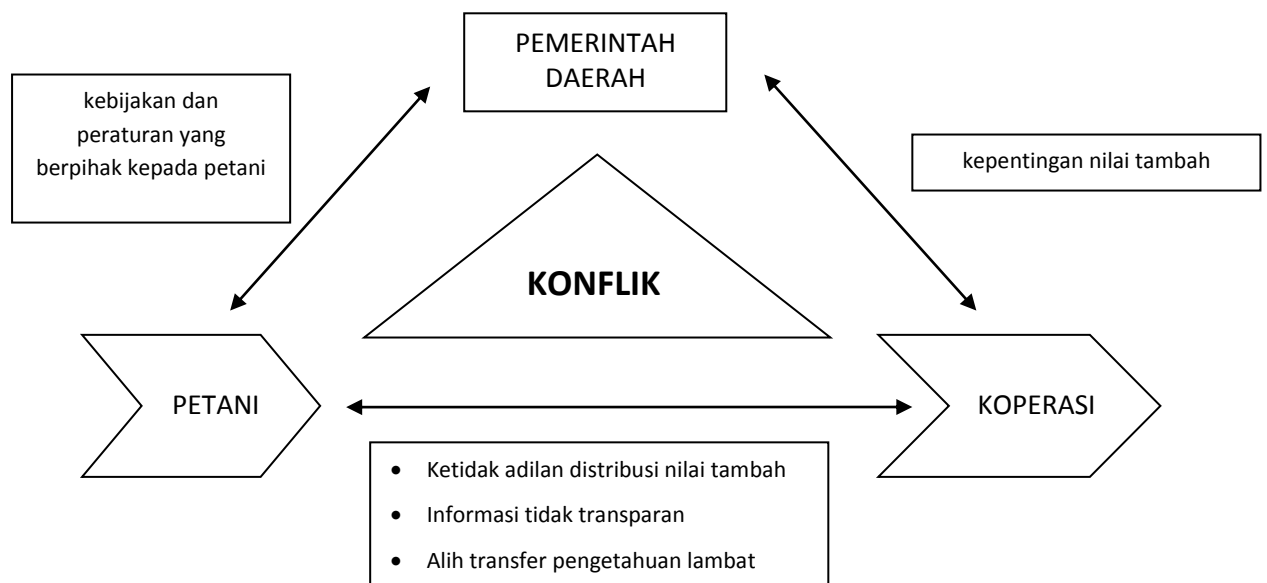
### **Sektor kopi yang berhubungan dengan konflik**

Proses sertifikasi terhadap komoditi kopi Gayo diantaranya *organic certification*, *coffee practise* serta *fair trade* melibatkan pelaku utama dalam rantai nilai kopi yaitu petani. Proses sertifikasi ini dibarengi dengan (1) ikatan kontrak antara petani sebagai pelaku utama dalam rantai nilai dengan koperasi dan (2) proses budidaya yang lebih ketat dengan sejumlah aturan yang bersifat mengikat kebebasan dalam berbudidaya. Implikasinya petani sebagai pelaku kunci dalam rantai nilai harus menyelaraskan antara produktifitas dengan kualitas produksi kopi.

Faktanya sebagian dari petani adalah masyarakat yang pernah berada di wilayah konflik sehingga tingkat penguasaan pengetahuan budidaya sesuai standarisasi yang ditetapkan menjadi lambat. Hal ini dipicu oleh faktor psikologis

seperti ketidak stabilan emosional dalam mensikapi perubahan dan pendidikan yang rendah. Di sisi lain proses alih pengetahuan dari koperasi yang menaungi petani belum berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan ini bertambah buruk ketika pembagian dan distribusi nilai tambah dari koperasi belum dinikmati petani.

Indikator inilah yang akan memicu konflik diantara petani sebagai pelaku utama, koperasi dan pemerintah daerah. Transparansi informasi diantara ketiga pihak belum terstruktur dengan baik sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik antar pelaku dalam rantai nilai kopi. Secara lebih sederhana hubungan para pihak dalam sektor rantai nilai kopi Gayo yang berdampak terhadap konflik dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Hubungan pelaku value chain terhadap indikator konflik**

### **Sektor kopi yang mencerminkan perdamaian pasca konflik.**

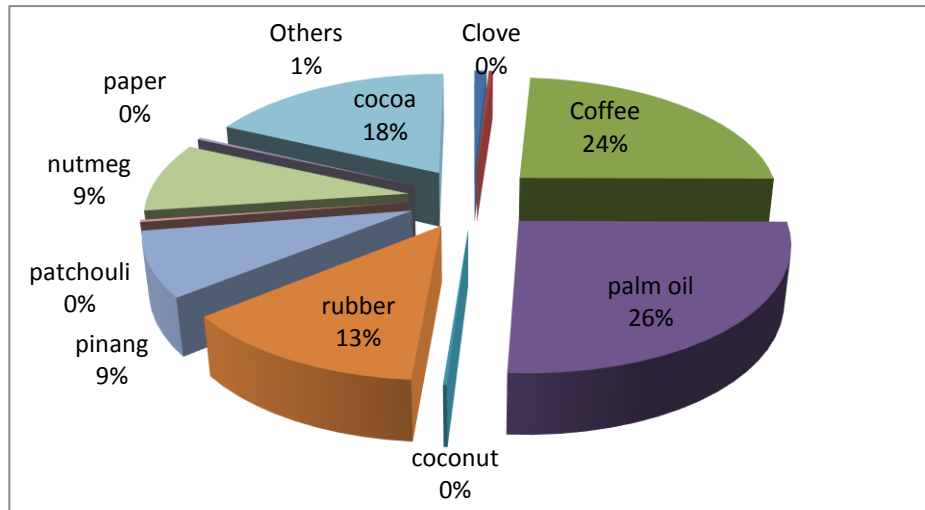
Kopi organik Gayo merupakan salah satu jenis kopi arabika terbaik di dunia. Hal ini dibuktikan dengan harga jual yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kopi jenis lainnya di dunia. Peningkatan harga dicapai akibat beberapa faktor, yaitu

- Komoditi spesifik (*speciallity commodity*) dengan nilai tambah (*added value*) yang tidak bisa digantikan oleh komoditi sejenis dari tempat yang berbeda.
- Proses *multiple certification* sehingga standarisasi harga bisa disesuaikan dengan pasar ekspor yaitu sertifikasi organik, *fair trade*, *coffe practice*, indikasi geografis.
- Proses pembentukan kualitas rasa (*taste*) disebabkan oleh alam dan kondisi daerah Gayo sehingga kemungkinan terciptanya pesaing di tempat berbeda mustahil terjadi.

Keunggulan komoditi diatas sangat memungkinkan sekali menjadi faktor terciptanya perdamaian. Proses peningkatan kesejahteraan menjadi indikator utama untuk meminimalisir faktor-faktor penyebab muncul kembali konflik di



Aceh. Peningkatan kesejahteraan tersebut bisa dicapai karena hampir semua indikator penyebab tingginya nilai tambah kopi Gayo tidak bisa diciptakan di tempat berbeda. Sehingga nilai tambah ini bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani yang terindikasi sebagian besar merupakan petani di wilayah konflik. Jika ditinjau dari segi ekspor, kopi Gayo merupakan komoditi yang mempunyai kontribusi besar setelah sawit (Forum Kopi Aceh, 2011).



**Gambar 2. Data Komoditi Pertanian Aceh (Forum Kopi Aceh, 2011)**

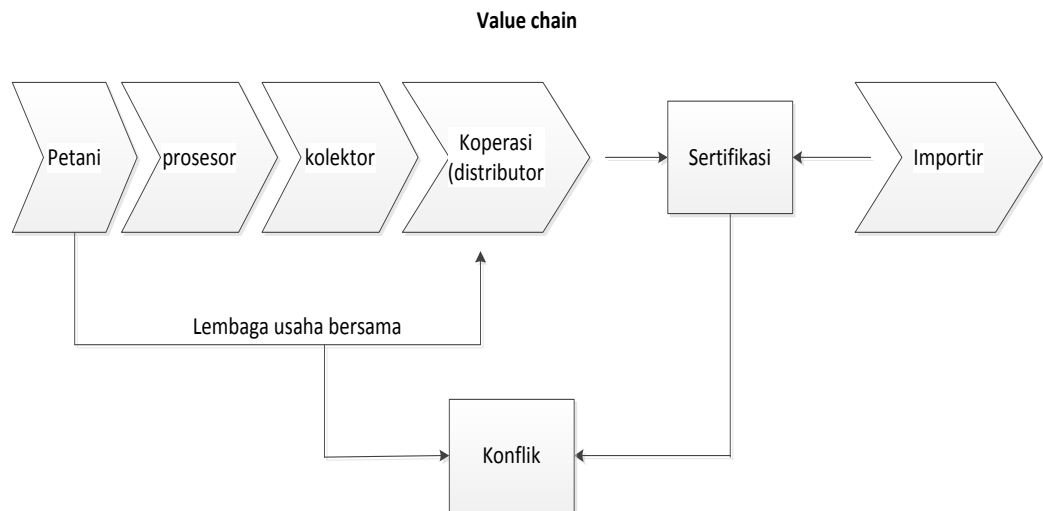
Tetapi jika ditinjau dari segi rasio nilai jual dengan kuantitas ekspor terhadap kontribusi pendapatan daerah, kopi Gayo merupakan komoditi terbaik dan terbesar dalam memberikan devisa bagi daerah. Secara tidak langsung dari mekanisme nilai pembagian keuntungan kopi di dalam sertifikasi *fair trade* terindikasi bahwa nilai jual kopi Gayo pernah menyentuh angka Rp 100.000,00/kg *green bean* kopi.

Sebagian besar sebaran populasi kelompok konflik berada pada pelaku petani ketika hal ini dikaitkan dengan pelaku rantai nilai kopi Gayo. Penyebaran lokasi kebun kopi yang lebih banyak terkonsentrasi di daerah transisi dan jauh dari kota menyebabkan petani menjadi pelaku yang rentan terhadap proses infiltrasi kedalam kelompok konflik baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kehilangan mata pencaharian akibat banyaknya lahan terlantar ketika konflik berlangsung juga menjadi penyebab petani banyak masuk ke dalam kelompok konflik.

Hubungan pelaku rantai nilai terhadap indikator konflik (Gambar 1) menjadi penyebab utama kurangnya ketertarikan pelaku yang berada dalam kelompok konflik untuk menekuni sektor usaha ini. Secara lebih jauh, ketidaktertarikan pelaku justru akan berkembang kedalam perspektif kekerasan akibat faktor ketidakpuasan. Perilaku dan psikologis kelompok konflik yang rentan terhadap gejala sosial ketika berhubungan dengan rasa ketidakadilan terhadap pendistribusian komoditi daerah dalam peningkatan kesejahteraan bisa menjadi pemicu utama.

### Perilaku ketidak puasan (*grievances*) pada sektor kopi.

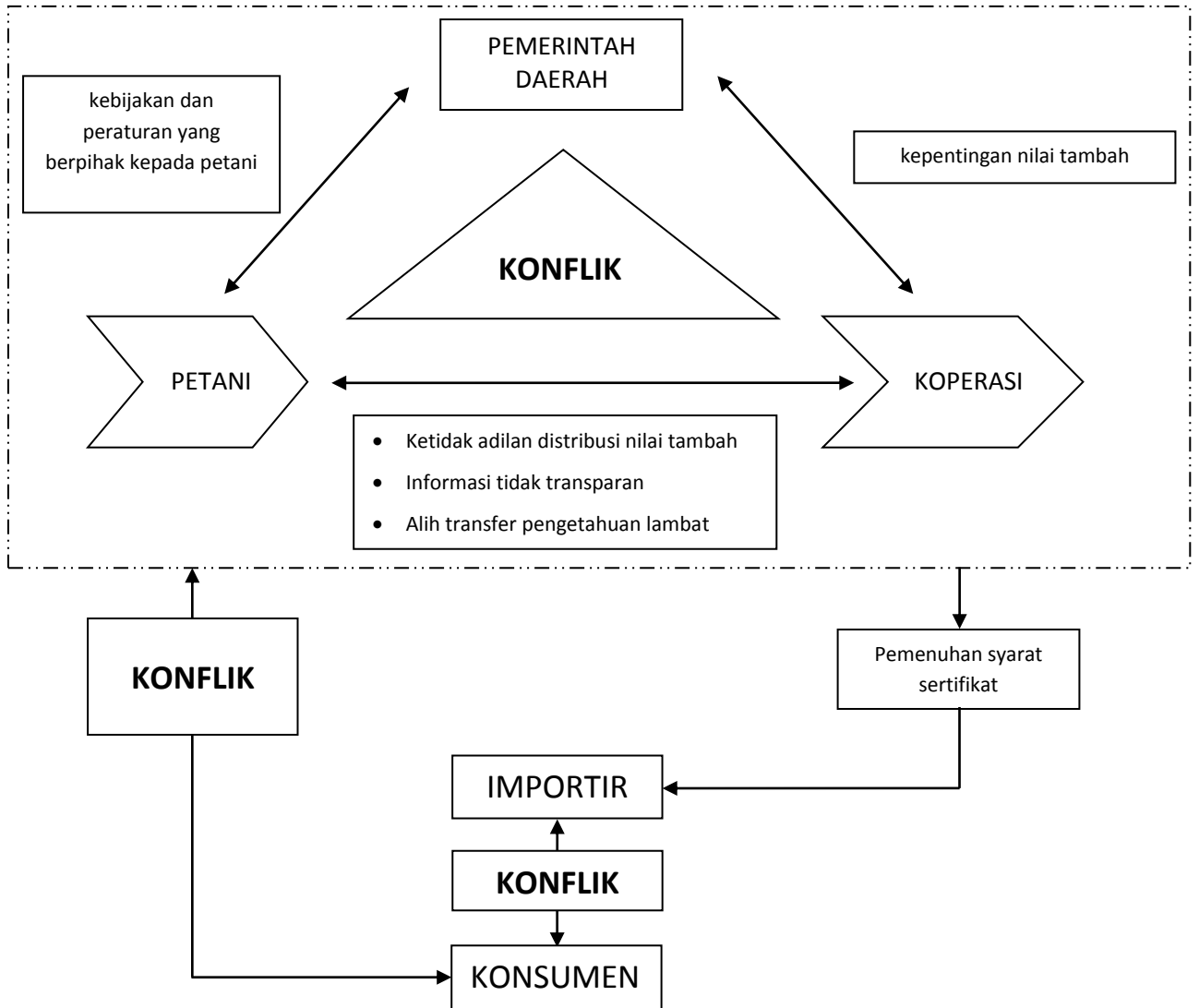
Ketidakadilan pendistribusian nilai tambah diantara pelaku dalam rantai nilai kopi menjadi penyebab terjadinya kesenjangan status sosial ekonomi pelaku utama yaitu petani (kelompok konflik) dengan koperasi. Bentuk-bentuk ketidak adilan (diskriminasi) terhadap pelaku ini dapat dilihat pada Gambar 1. Indikasi ketertarikan pelaku untuk bersama-sama dalam meningkatkan nilai tambah komoditi bisa dilihat dari proses pembentukan koperasi sebagai lembaga swadaya untuk memfasilitasi proses sertifikasi bagi kelompok-kelompok tani dalam rantai nilai. Kenyataannya, lembaga ini menjadi pemicu terjadinya konflik yang lebih luas (Gambar 2).



**Gambar 2. Relasi lembaga usaha bersama terhadap konflik**

### Perilaku keserakahan (*greed*) pada sektor kopi.

Indikator-indikator yang menjadi keunggulan kopi Gayo (faktor peningkatan harga) memicu timbulnya keserakahan. Pendistribusian nilai *fair trade* kopi Gayo yang menjadi hak petani terbukti tidak pernah sepenuhnya diberikan. Tingginya nilai jual kopi Gayo menjadi penyebab timbulnya praktek penggelapan nilai pajak komoditi bagi daerah. Dua hal ini menjadi pemicu konflik yang berbeda. **Pertama**, konflik yang timbul di internal rantai nilai itu sendiri terutama antara petani dengan koperasi. **Kedua**, konflik antara pemerintah daerah dengan koperasi. Kualitas standarisasi persyaratan kualitas dan tanggung jawab environment (lingkungan) sertifikasi yang belum dipenuhi oleh koperasi dan importir akan berdampak terhadap preferensi konsumen negara tujuan terhadap kopi Gayo. Implikasinya akan berdampak buruk terhadap nilai dari komoditi itu sendiri. Sehingga efek ini akan berantai terhadap pelaku kunci rantai nilai yaitu petani. Hal ini justru akan memicu konflik yang lebih luas lagi (Gambar 3)



**Gambar 3. Hubungan praktek ekonomi ilegal dengan konflik**

### **Sertifikasi Berkelanjutan pada Produk Kopi**

Kopi adalah komoditas pangan yang tidak sekedar untuk kepentingan terkait nutrisi dan keamanannya (nutrition and safety), tetapi lebih kepada bahan kenikmatan terkait karakteristik mutu fisik dan citarasa serta prestise dan simbol. Konsumen kopi sebagian besar terdiri dari kalangan menengah ke atas yang mengutamakan karakter dan simbol. Konsumen utama didominasi negara Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Akhir-akhir ini banyak bermunculan standar

produksi kopi yang berbasis berkelanjutan. Kesadaran masyarakat di negara maju terhadap pentingnya sistem pertanian berkelanjutan, ketelusuran produk dan penghargaan terhadap kearifan local melahirkan standar-standar mandiri (*private standards*) untuk sertifikasi kopi berkelanjutan.

Sistem sertifikasi kopi menurut standar seperti organik, Utz Certified, 4C, Fairtrade, Rainforest, CAFÉ Practices dan Bird Friendly Coffee adalah standar kopi berkelanjutan dan *eco-friendly* yang telah berkembang sedemikian rupa, di samping standar global berbasis *good agricultural practices* (GAP) dan indikasi geografis.

Kopi bersertifikat berkelanjutan jumlahnya tidak banyak, namun sampai saat ini sudah mencapai 16% dari total kopi yang diperdagangkan, sedangkan kopi spesialti berada pada kisaran antara 5 – 6 %. Walaupun jumlahnya tidak besar, tetapi cenderung terus mengalami peningkatan. Rangsangan insentif yang diberikan oleh konsumen terhadap kopi bersertifikat mengalami perubahan. Pada awalnya berupa insentif (tambahan) harga premium yang diberikan kepada produsen dan rantai pasok berkelanjutan; besarnya dapat mencapai sekitar USD 0,4 kg per kilogram. Insentif tersebut terus mengalami penurunan, dipicu dengan maraknya insentif insentif sertifikasi baru yang ditawarkan oleh pengelola sertifikat. Kurangnya harmonisasi suatu sistem dengan sistem sejenis, menyebabkan banyak produk kopi disertifikasi secara berganda menurut sistem yang berbeda, dan ketidakharmonisan sistem sertifikasi yang ada (*double, triple* bahkan lebih) akan menimbulkan kebingungan di tingkat konsumen retail dan insentif yang diberikan atau diterima petani terus menurun (Misnawi dan Wahyudi, 2014).

Konsep berkelanjutan merupakan suatu gagasan yang menggabungkan tiga komponen utama, yaitu *people, planet* dan *profit* (3P). Konsep 3P ini merupakan konsep yang paling umum dalam menjelaskan definisi dari konsep berkelanjutan. Dalam konsep yang lain, konsep 3P juga dapat didefinisikan menjadi faktor lingkungan (*environmental-planet*), ekonomi (*economic-profit*), dan social (*social-people*). Faktor lingkungan dalam konsep berkelanjutan memfokuskan terhadap terbentuknya integritas berwawasan lingkungan (*ecologic integrity*), sedangkan faktor sosial mengutamakan terbentuknya keadilan sosial dalam komunitas (*social equity*). Di lain pihak, faktor ekonomi merupakan factor yang berfokus pada kemantapan ekonomi (*economic vitality*). Kegiatan produksi dikategorikan sebagai bersifat berkelanjutan apabila tiga pilar *sustainability*, yaitu aspek lingkungan (*environment*), sosial (*social*) dan ekonomi (*economy*, termasuk mutu, keamanan produk dan ketelusuran) dapat terpenuhi. Penerapan sistem ekonomi hijau (*green economy*), teknologi ramah lingkungan (*eco-friendly technology*) serta *social responsibility* (pertanggungjawaban sosial) merupakan beberapa cara perwujudan pertanian yang telah banyak diterapkan.

Secara lebih terperinci Pretty (2008) menjelaskan bahwa sistem pertanian berkelanjutan mencakup beberapa tujuan utama, antara lain :

1. Mengintegrasikan konsep proses biologis dan ekologis dalam sistem pertanian seperti siklus hara, fiksasi nitrogen, regenerasi tanah, alelopati, kompetisi, dan parasitisme dalam proses produksi komoditas pertanian
2. Meminimumkan penggunaan bahan yang tidak dapat diperbaharui yang berpotensi merusak lingkungan, petani/pekebun, serta konsumen
3. Memaksimumkan kemampuan dan keterampilan petani untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi kebergantungan terhadap faktor eksternal yang berbiaya tinggi serta
4. Mengoptimumkan kolaborasi berbagai pihak dengan keahlian yang berbeda untuk bekerja sama memecahkan berbagai masalah pertanian dan sumberdaya alam.

Sebagian besar penghasil kopi adalah negara sedang berkembang yang kesadaran akan arti berkelanjutan dalam hal kelestarian lingkungan, pengakuan hak azasi, maupun penjagaan keamanan pangan dan kesehatannya masih rendah dibanding pertimbangan-pertimbangan ekonominya. Beberapa pemasok juga dapat memilih sertifikasi ganda (*double certification*) dalam rangka memenuhi tuntutan pasar (pengguna) kopinya maupun ekspektasi akan diperolehnya tambahan premium harga serta akses pasar yang lebih luas.

Penelitian Almquist (2011) membandingkan rata-rata tingkat pendapatan diantara petani yang bersertifikasi Fairtrade dan yang tidak terlibat di Aceh Tengah, memperlihatkan tidak ada manfaat ekonomi yang diterima petani bersertifikat. Pendapatan petani yang tidak bersertifikat rata-rata ... per pendapatan per tahun dari kopi yang diproduksi per kg. Namun hasil produksi petani bersertifikat lebih besar dibandingkan dengan tidak bersertifikat dimana hal ini sebagai dampak dari pendampingan teknis agronomi dan teknologi yang disediakan oleh koperasi. Almquist menyatakan manfaat yang diterima petani bersertifikat berbeda tergantung kepada lokasi kebun dan sertifikat Fairtrade tidak selalu bermanfaat secara ekonomi namun juga secara sosial.

Penelitian lain di lokasi yang sama dilakukan oleh Fogelberg (2012) yang memperkuat penelitian Almquist (2011) bahwa manfaat ekonomi yang diterima petani bersertifikat terkait dengan lokasi kebun yang khusus. Temuan penelitian yang sama adalah pendapatan petani tidak bersertifikat lebih tinggi dibandingkan petani bersertifikat. Namun dengan adanya sistem Fairtrade, Fogelberg menyatakan tumbuhnya *awareness* petani kopi terhadap dinamika harga kopi di tingkat dunia.

### **Kesimpulan dan Saran**

Salah satu daerah penghasil utama kopi Indonesia adalah provinsi Aceh. Umumnya tanaman dikelola dengan pola perkebunan rakyat. Pola perkebunan yang seperti ini pengelolaannya masih bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi budidaya kopi sesesuai GAP.

Pengamatan dilapangan memperlihatkan masih terdapat permasalahan dalam perluasan lahan kopi karena menyangkut iklim sehingga ekstensifikasi lahan tidak

perlu dilakukan. Peningkatkan produksi harus lebih difokuskan pada perbaikan teknik budidaya, peremajaan perkebunan yang sudah tua dan penggunaan bibit unggul.

Dinamika konflik dalam rantai nilai kopi organik tergantung kepada keberpihakan, kebijakan dan regulasi pemerintah, dan transparansi informasi antara petani dan koperasi. Keberpihakan pemerintah terhadap petani diperlukan untuk memperkuat struktur produksi dan pemasaran dalam rantai nilai. Kebijakan dan regulasi diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keadilan kepada petani dan para pelaku rantai nilai lainnya. Transparansi informasi diperlukan untuk menjamin keterbukaan terhadap sistem sertifikasi yang ada dan keadilan terhadap semua pelaku dalam rantai nilai.

### Daftar Pustaka

- Almqvist, Anna-Carin. 2011. *Coffee, a Fair Trade? – A study about Fairtrade certified Gayo coffee farmers in Aceh, Indonesia*. Student Ex-Change Program Report. Unpublished. Department of Horticulture, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Alnarp.
- Fogelberg, Johan. 2012. *Fairtrade coffee, fair enough? - A study comparing Fairtrade certified coffee producers and uncertified coffee producers in Aceh Tengah, Indonesia*. Thesis. Unpublished. Department of Horticulture, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Alnarp.
- [Bank Dunia]. 2009. *Diagnosis Pertumbuhan Aceh : Mengidentifikasi hambatan-hambatan utama pertumbuhan ekonomi pasca konflik dan pasca bencana*. Bank Dunia Indonesia. Jakarta.
- [BRR]. 2008. *Dampak Konflik, Tsunami dan Rekonstruksi terhadap Kemiskinan di Aceh*. BRR NAD-Nias, Bappeda Provinsi Aceh, Bank Dunia Indonesia. Jakarta.
- Gündüz, C and Klein, D. 2008. *Conflict Sensitive Approaches to Rantai nilai Development*. United States Agency for International Development. Washington.
- Justino, P. 2007. *On the link between Violent Conflict and Household Poverty : How Much Do We Really Know?*. MICROCON Research Working Paper 1. Institute Development Studies, University of Sussex. United Kingdom.
- Mac Ginty, R. and William, A. 2009. *Conflict and Development*. Routledge – Taylor & Francis Group. London and New York.
- Misnawi dan Wahyudi, T. 2014. *Sistem Sertifikasi Berkelanjutan pada Produk Kopi*. Review Penelitian Kopi dan Kakao Volume 1 No. 1 Maret 2014.. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Jember.
- Pretty, J. 2008. *Agricultural Sustainability : Concepts, Principles and Evidences* Philosophical Transactions of Royal Society B, 363, 447-465.
- Tajima, Y. 2010. *Understanding the Livelihoods of Former Insurgents: Aceh, Indonesia*. Indonesian Social Development Paper No. 17. Conflict and Development Team - World Bank Indonesia. Jakarta.

Watson, C. 2010. *Socio-economic reintegration of ex-combatants – Understanding and addressing key challenges*. Reintegration Briefing Paper – 1.1. International Alert, Brussel.